

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut BUMN harus adaptif dengan segala tantangan dan perubahan zaman. Upaya menghadapi hal tersebut, pemerintah menerapkan konsepsi *holding company* yang dilakukan melalui peralihan saham negara pada BUMN agar meningkatkan nilai tambah pendapatan negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan peralihan saham dan kesesuaian proses peralihan saham PT Perikanan Indonesia (Persero) oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akibat hukum peralihan saham antara kedua perseroan BUMN tersebut bagi negara sebagai pemegang saham. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan studi arsip. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif. Peralihan saham perseroan BUMN dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan. Unsur esensi peralihan saham merupakan sumber penyertaan modal negara dalam bentuk lain. Proses peralihan saham PT Perikanan Indonesia (Persero) oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang terjadi negara merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan tetap sebagai pemegang saham mayoritas PT Perikanan Indonesia (Persero) melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Kata Kunci: *Peralihan Saham, Holding BUMN, Perusahaan Perseroan.*